Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)
Journal page is available to
https://e-jurnal.jurnalcenter.com/index.php/micjo
Email: admin@jurnalcenter.com

E.ISSN. 3032-2472
Vol. 2 No. 1 Edisi
Januari 2025

KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA (PROBLEMATIKA, TANTANGAN DAN LINTASAN SEJARAH KURIKULUM DI INDONESIA)

THE ISLAMIC EDUCATION CURRICULUM IN INDONESIA: PROBLEMS, CHALLENGES, AND THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE CURRICULUM IN INDONESIA

Nurhidaya M[1*]
[1]Pendidikan Agama Islam, Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar
[*]Email Koresponden: nurhidayam@unismuh.ac.id

DOI: https://doi.org/10.62567/micjo.v2i1.398

Article info:
Submitted: 25/12/24 Accepted: 06/01/25 Published: 30/01/25

Abstract

Islamic education in Indonesia has undergone significant transformations to meet the demands of modern society. From its inception in the archipelago to the present, the Islamic education curriculum has evolved in response to societal needs. However, challenges persist, including limitations in teaching methods, the integration of Islamic values with scientific advancements, and the readiness of human resources. Historically, the curriculum has gone through several important phases: the colonial era, the post-independence period, and the globalization era. Each phase introduced unique challenges and policies in the development of Islamic education. The Indonesian government, through regulations such as the National Education System Law and competency-based curricula, has sought to integrate Islamic education into the national education system. However, this integration often creates dilemmas between preserving Islamic values and embracing modern scientific knowledge. This study employs a qualitative approach, focusing on library research to examine the historical development, challenges, and solutions related to Islamic education curricula in Indonesia. The findings indicate ongoing issues such as the dichotomy between religious and secular knowledge, curriculum centralization, and curriculum overload. It also highlights the need for comprehensive reform, professional development of teachers, and the integration of Islamic and secular education to produce well-rounded and competitive graduates. An adaptive and responsive curriculum is essential for maintaining the relevance of Islamic education in the face of rapid global changes, ensuring that future generations are equipped with strong moral integrity, solid religious knowledge, and diverse skills.
Keywords: Islamic Education, Curriculum in Indonesia, and History of curriculum Development

Abstrak

Pendidikan Islam di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan untuk memenuhi tuntutan masyarakat modern. Sejak pertama kali diperkenalkan di nusantara hingga saat ini, kurikulum pendidikan Islam terus berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, tantangan masih tetap ada, termasuk keterbatasan dalam metode pengajaran, integrasi nilai-nilai Islam dengan kemajuan ilmu pengetahuan, dan kesiapan sumber daya manusia. Secara historis, kurikulum ini telah melalui beberapa fase penting: masa kolonial, masa pasca kemerdekaan, dan era globalisasi. Setiap fase memperkenalkan tantangan dan kebijakan yang unik dalam pengembangan pendidikan Islam. Pemerintah Indonesia, melalui regulasi seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan kurikulum berbasis kompetensi, telah berupaya mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional. Namun, integrasi ini sering kali menimbulkan dilema antara pelestarian nilai-nilai

Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)
Journal page is available to
https://e-jurnal.jurnalcenter.com/index.php/micjo
Email: admin@jurnalcenter.com
E.ISSN. 3032-2472
Vol. 2 No. 1 Edisi
Januari 2025

Islam dan penerimaan terhadap ilmu pengetahuan modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada penelitian kepustakaan untuk mengkaji perkembangan historis, tantangan, dan solusi terkait kurikulum pendidikan Islam di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan adanya masalah yang terus berlangsung, seperti dikotomi antara ilmu agama dan ilmu sekuler, sentralisasi kurikulum, serta kelebihan muatan kurikulum. Penelitian ini juga menyoroti perlunya reformasi menyeluruh, pengembangan profesionalisme guru, serta integrasi pendidikan Islam dan pendidikan sekuler untuk menghasilkan lulusan yang seimbang dan kompetitif. Kurikulum yang adaptif dan responsif sangat penting untuk menjaga relevansi pendidikan Islam di tengah perubahan global yang cepat, guna memastikan bahwa generasi mendatang memiliki integritas moral yang kuat, pengetahuan agama yang solid, dan keterampilan yang beragam.

Kata Kunci: Pendidikan Islam, Kurikulum di Indonesia dan Sejarah perkembangan kurikulum

1. PENDAHULUAN

Pendidikan Islam di Indonesia telah mengalami berbagai dinamika perubahan dan adaptasi yang mencerminkan respons terhadap tuntutan zaman. Sejak masa awal masuknya Islam di Nusantara, hingga kini, kurikulum pendidikan Islam terus berkembang seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Kurikulum pendidikan Islam berperan penting dalam membentuk generasi yang memiliki pemahaman keislaman yang kokoh sekaligus mampu bersaing dalam dunia modern. Namun, ada beberapa permasalahan mendasar yang dihadapi, baik dalam aspek konseptual maupun praktis, seperti keterbatasan dalam metode pengajaran, integrasi nilai-nilai Islam dengan perkembangan ilmu pengetahuan, serta kesiapan sumber daya manusia.

Kurikulum Pendidikan Islam dari sudut pandang historis, telah melalui berbagai fase penting, mulai dari era kolonial, masa kemerdekaan, hingga era globalisasi. Setiap fase membawa tantangan dan kebijakan yang berbeda dalam mengembangkan pendidikan Islam. Hal ini dapat dilihat dari upaya pemerintah melalui serangkaian regulasi, seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan kurikulum berbasis kompetensi, untuk mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan Nasional, yang kerap kali menimbulkan dilema antara menjaga nilai-nilai keislaman dan kebutuhan akan keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan modern. Memasuki abad ke-21, pendidikan Islam di Indonesia dihadapkan pada tantangan baru berupa globalisasi, teknologi digital, dan perubahan sosial yang sangat pesat. Kurikulum pendidikan Islam diharapkan tidak hanya mampu menjawab kebutuhan lokal, tetapi juga dapat bersaing dalam konteks global. Kurikulum yang adaptif dan responsif terhadap perubahan tersebut diperlukan agar pendidikan Islam tetap relevan di tengah perubahan zaman, terutama dalam menyiapkan generasi yang memiliki integritas moral, pengetahuan agama yang kuat, serta keterampilan yang mumpuni di berbagai bidang.

2. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam menganalisis bahan bacaan terkait permasalahan yang diangkat pada penelitian ini. Terdapat 3 poin yang dibahas dalam penelitian ini yaitu Problematika Kurikulum Pendidikan Islam di Indonesia, Lintasan Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, dan tantangan dan antisipasi menghadapi abad 12. Penelitian ini termasuk jenis penelitian Library research adalah jenis penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan bahan bacaan atau literatur yang membantu menjawab masalah yang telah dirumuskan oleh peneliti. Analisis secara deduktif dan induktif menjadi kekuatan peneliti untuk menganalisis bahan atau sumber bacaan yang telah dikumpulkan terkait kurikulum

Pendidikan Islam di Indonesia seperti problematika, tantangan dan lintasan Sejarah Kurikulum di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Problematika Kurikulum Pendidikan Islam di Indonesia

Problematika Pendidikan Islam di Indonesia meliputi berbagai hal, di antaranya yaitu permasalahan tentang adanya pemisahan antara ilmu umum dan ilmu agama, yang menciptakan pandangan bahwa pendidikan Islam hanya fokus pada aspek spiritual, tanpa relevansi dengan ilmu-ilmu praktis yang dibutuhkan di dunia kerja. Hal ini juga disebut dengan problematika Dikotomi Ilmu (Rozi, 2019). Selain itu, dalam sebuah tulisan oleh Mujibur Rohman tentang Problematika Kurikulum Pendidikan Islam, dijelaskan bahwa ada beberapa problematika yang terjadi misalnya dalam konsep tujuan pendidikan Islam kurikulum mengalami pergeseran khususnya madrasah kini lebih berfokus pada pengajaran ilmu umum dengan tambahan agama sebagai ciri khas, tetapi tidak sedalam pada masa lalu. Kemudian, materi kurikulum yang Overload yaitu kurikulum madrasah terdiri dari 70% pelajaran umum dan 30% pelajaran agama. Struktur ini menyebabkan materi menjadi sangat padat, sehingga siswa tidak dapat mendalami pelajaran secara optimal, hanya memahami permukaan tanpa penguasaan bidang yang mendalam (Rohman, 2015).

Permasalahan yang lainnya yaitu adanya masalah kurikulum sentralistik yaitu sistem sentralistik dalam pengembangan kurikulum menghambat inovasi di tingkat lembaga karena instruksi sering kali harus dijalankan secara kaku dari atas. Ini mengakibatkan pendekatan yang terlalu dogmatis dan menghasilkan lulusan yang sekadar mengikuti pola baku, tanpa adaptasi atau kreativitas yang sesuai dengan perkembangan zaman (Addakhil, 2019). Problematika Kurikulum Pendidikan Islam di Indonesia, menurut Damopolii dalam jurnalnya "Problematika Pendidikan Islam dan upaya-upaya pemecahannya", meliputi beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Berikut penjabarannya:

a. Faktor Internal
   1) Relasi kekuasaan dan orientasi pendidikan: Tujuan pendidikan Islam idealnya untuk memanusiakan manusia dan membentuk pribadi yang bermoral. Namun, sering kali terjadi disorientasi pendidikan akibat tuntutan pragmatisme dalam masyarakat yang lebih berorientasi pada kebutuhan pasar.
   2) Masalah kurikulum: Kurikulum pendidikan Islam cenderung sentralistik dan otoriter, sehingga menghambat inovasi. Kurikulum yang sarat muatan juga membuat siswa terbebani dengan banyak mata pelajaran, yang pada akhirnya menurunkan kualitas pendidikan. Hal ini senada disampaikan oleh Bakar menyebutkan bahwa kurikulum kurang fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan lokal dan perubahan zaman(Bakar, 2015).
   3) Pendekatan pembelajaran: Metode pengajaran konvensional masih dominan, dengan pendekatan ceramah yang kurang mendorong partisipasi aktif siswa.
   4) Profesionalitas dan kualitas SDM: Masih banyak guru dan tenaga pendidik yang belum berkualitas dan profesional, yang memengaruhi kualitas pendidikan Islam secara keseluruhan.
   5) Biaya pendidikan: anggaran pendidikan masih terbatas dan belum mencapai 20% dari APBN, yang berdampak pada fasilitas dan kesejahteraan pendidik.

b. Faktor Eksternal
   1) Dikotomi Ilmu agama dan Ilmu umum: terdapat pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum, yang menyebabkan perdebatan mengenai integrasi keduanya.

2) Pengetahuan umum yang terlalu luas: kurikulum sering kali terlalu general dan kurang berfokus pada penyelesaian masalah konkret yang dihadapi masyarakat.
3) Kurangnya semangat penelitian: rendahnya dorongan untuk melakukan penelitian menyebabkan kurangnya pengembangan intelektual di kalangan peserta didik.
4) Orientasi pada sertifikat: pendidikan lebih berorientasi pada pencapaian sertifikat ketimbang pengetahuan mendalam, yang menyebabkan lemahnya kualitas lulusan.

Solusi yang disarankan Damopolii adalah melakukan reformasi pendidikan Islam yang komprehensif, memperkuat profesionalitas tenaga pendidik, dan meningkatkan fleksibilitas kurikulum agar dapat menghadapi tantangan globalisasi dengan lebih baik (Damopolii, 2015). Kompleksitas kurikulum yang berlebihan membebani siswa dan guru, serta perubahan kurikulum yang sering kali hanya mengganti nama tanpa perubahan esensial, membuat penerapannya kurang efektif. Ini mengakibatkan kurikulum tidak dapat mengakomodasi kebutuhan yang beragam di berbagai daerah di Indonesia. Sedangkan, banyak guru yang belum memiliki pemahaman atau kompetensi yang memadai untuk mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam pembelajaran mereka, sehingga pendidikan karakter sulit diterapkan secara konsisten di semua sekolah (Julaeha, 2019).

Desi Sabtina dalam jurnal yang ditulisnya menyarankan solusi melalui pengembangan kurikulum yang integratif, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, dan pendekatan holistik yang menggabungkan nilai-nilai Islam dengan perkembangan global untuk menjaga relevansi pendidikan Islam di era modern ini (Sabtina, 2023). Upaya penyelesaian perlu dilakukan dengan memperbaiki profesionalisme guru, memperbarui metode pengajaran, dan merevisi kurikulum untuk menjawab tantangan modern, serta mengintegrasikan pendidikan agama dan umum untuk menciptakan lulusan yang seimbang dan kompetitif (Adelia & Mitra, 2021).

B. Lintasan sejarah kurikulum pendidikan Islam di Indonesia

Berdasarkan jurnal Rina Nirwana dan Qolbi Khoiri, Kurikulum Pendidikan Islam di Indonesia diartikan sebagai kerangka dan pedoman pendidikan yang dirancang khusus untuk membimbing peserta didik memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Kurikulum ini tidak hanya terdiri dari mata pelajaran agama tetapi mencakup seluruh aspek pendidikan yang terintegrasi, mulai dari akidah, ibadah, hingga akhlak. Kurikulum pendidikan Islam bertujuan untuk menyediakan landasan spiritualitas dan moralitas, integrasi Soft Skills dan Hard Skills: Kurikulum ini berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa pendidikan agama Islam menjadi bagian integral dari pendidikan nasional di Indonesia. Dengan dukungan berbagai undang-undang dan peraturan, kurikulum ini diharapkan mampu membentuk generasi yang tidak hanya kompeten dalam ilmu pengetahuan tetapi juga berakhlak dan bermoral tinggi. Kurikulum Pendidikan Islam terus dikembangkan agar relevan dengan kebutuhan zaman, mencakup adaptasi terhadap perubahan sosial, ilmu pengetahuan, dan teknologi, sambil tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip agama (Nirwana & Khoiri, 2023).

a. Kurikulum Pendidikan Agama Islam Masa Orde Lama (1945-19680)

Pada masa Orde Lama, kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia mulai diimplementasikan secara resmi pada tahun 1950 melalui aturan SKB dua menteri (Menteri PP & K dan Menteri Agama). Sebelumnya, ada keinginan dari masyarakat, terutama umat Islam, agar PAI menjadi mata pelajaran wajib di sekolah. Namun, hal ini selalu ditolak oleh pemerintah kolonial Belanda dengan alasan netralitas pendidikan. Setelah kemerdekaan, PAI akhirnya ditetapkan sebagai mata pelajaran wajib yang diajarkan mulai dari tingkat SD hingga perguruan tinggi. Pada periode ini, Ki Hadjar Dewantara dan Mr.Soewandi berperan penting dalam menetapkan 10 pedoman dasar pendidikan dan pengajaran yang mencakup aspek

keagamaan, nasionalisme, dan tanggung jawab sosial, termasuk perasaan cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Negara. Kurikulum yang diterapkan masih kental dengan pengaruh sistem pendidikan Belanda dan Jepang yang berfokus pada cinta negara dan kesadaran berbangsa (Zazkia & Hamami, 2021).

Kurikulum Pendidikan Agama Islam dibagi dalam tiga periode utama: orde lama, orde baru, dan reformasi. Berikut lintasan sejarah pada masa orde lama menurut Gusman dalam tulisannya yang berjudul' "Studi Kebijakan Pendidikan Agama Islam pada orde lama, orde baru dan reformasi" (Gusman, 2022).

1) Kurikulum 1947 (rencana pembelajaran 1947): merupakan kurikulum pertama yang berorientasi pada pendidikan karakter dan kesadaran bernegara. Pengajaran saat itu lebih berfokus pada aspek mental dan moral untuk membentuk rasa patriotisme.
2) Kurikulum 1952: silabus ini memberikan detail untuk setiap mata pelajaran, di mana satu guru mengajar satu mata pelajaran spesifik. Namun, siswa diposisikan sebagai objek pembelajaran, sedangkan guru sebagai pusat pengetahuan.
3) Kurikulum 1964: menekankan pada Panca Wardhana (mental, intelektual, emosional, keterampilan, dan fisik). Pendidikan dasar lebih menitikberatkan pada pengetahuan praktis dan relevansi dengan kebutuhan Masyarakat (Gusman, 2022). Diperkenalkan sebagai "Rentjana Pendidikan 1964," kurikulum ini menekankan pada metode pembelajaran aktif, kreatif, dan produktif. Konsep pembelajaran gotong royong terpimpin diterapkan untuk meningkatkan partisipasi siswa, dimana mereka didorong untuk mengembangkan pemikiran kritis dan pemecahan masalah (problem-solving). Kurikulum ini diharapkan mencetak pribadi Pancasilais yang sosialis dan bermoral, sesuai dengan nilai-nilai yang diinginkan pada masa itu (Anitasari & Cahyono, 2023).

Kurikulum pada masa orde lama memiliki tujuan untuk membentuk karakter nasional, menanamkan nilai-nilai Pancasila, meningkatkan akses pendidikan agama, dan mencerdaskan masyarakat sebagai pondasi awal bagi pembangunan Indonesia merdeka. Pemerintah bertujuan untuk memberikan kesempatan pendidikan yang lebih luas tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau agama. Pasal 31 UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan merupakan dasar dari tujuan ini, sehingga pendidikan dapat diakses oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi. Kemudian mengintegrasikan pendidikan agama, khususnya Islam, ke dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini terlihat dari Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Menteri Agama pada 1946, yang menetapkan bahwa pendidikan agama dapat diajarkan di sekolah-sekolah umum (Sudarmono, 2020).

b. Kurikulum Pendidikan Agama Islam pada masa orde baru (1968-1998)
   1) Kurikulum 1968: Berfokus pada pengembangan intelektual siswa dengan pendekatan yang sangat terstruktur namun kurang terhubung dengan masalah nyata di masyarakat.
   2) Kurikulum 1975: Diperkenalkan manajemen berbasis tujuan untuk meningkatkan efisiensi pengajaran. Kurikulum ini memperkenalkan metode Proses Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI) dengan pembelajaran yang lebih sistematis dan terencana.
   3) Kurikulum 1994: Kombinasi antara kurikulum 1975 dan 1984 dengan penambahan muatan lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing (Gusman, 2022).

Perbedaan utama antara kedua periode ini adalah bahwa pada masa orde lama, kurikulum lebih berfokus pada pengembangan karakter dan nasionalisme dengan struktur yang sederhana dan terpisah. Sedangkan pada masa orde baru, kurikulum menjadi lebih terstruktur, sentralistik, dan difokuskan pada efisiensi dan keterkaitan materi pembelajaran,

dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan secara lebih sistematis (Anitasari & Cahyono, 2023).

c. Kurikulum Pendidikan Agama Islam Masa Reformasi (1998-sekarang)

1) Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)

KBK dikembangkan untuk menumbuhkan kemandirian, berpikir rasional, dan kritis pada peserta didik, disesuaikan dengan potensi daerah dan kearifan lokal. Namun, pelaksanaannya menemui kendala seperti kurangnya perangkat teknis yang mendetail, membuat implementasinya tidak optimal di lapangan (Ulya & Syafei, 2022).

2) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

KTSP didesain dengan pendekatan desentralisasi, memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyesuaikan kurikulum sesuai potensi lokal. Meskipun KTSP merupakan penyempurnaan dari KBK, permasalahan dalam pelaksanaan tetap terjadi, seperti ketidakseimbangan dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotor (Ulya & Syafei, 2022).

3) Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang difokuskan pada pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk membentuk karakter peserta didik yang unggul. Kurikulum ini bertujuan menciptakan generasi yang tidak hanya berpengetahuan luas tetapi juga memiliki karakter kuat yang berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia. Kurikulum ini mengintegrasikan aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotor (keterampilan) untuk memberikan pembelajaran yang komprehensif. Artinya, pembelajaran tidak hanya berfokus pada pemahaman teori tetapi juga pada pengembangan sikap positif dan keterampilan praktis siswa. Kurikulum 2013 dirancang untuk menanamkan nilai-nilai karakter dalam diri siswa, seperti sikap religius, nasionalisme, gotong royong, dan kemandirian (Suryana & Pratama, 2018).

Selain aspek akademik, kurikulum 2013 memberikan penekanan pada keterampilan yang dibutuhkan siswa dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, siswa didorong untuk memiliki keterampilan yang relevan dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Dalam Kurikulum 2013, peran guru bergeser dari pengajar utama menjadi fasilitator. Guru diharapkan memandu dan memfasilitasi proses belajar, memberi ruang bagi siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran dan berinteraksi langsung dengan materi yang mereka pelajari (Suryana & Pratama, 2018).

Kurikulum ini adalah kelanjutan dari Kurikulum Berbasis Kompetensi tahun 2004 dan sistem penilaian dalam Kurikulum 2013 mengukur ketiga aspek ini secara berimbang untuk memberikan pandangan holistik tentang perkembangan siswa, dan penekanan pada ketiga aspek ini dianggap penting dalam mendukung penguatan karakter siswa. Penekanan pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai manifestasi kesuksesan Kurikulum 2013 sangat bergantung pada dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, tenaga pendidik, siswa, orang tua, dan masyarakat. Sarana dan prasarana yang memadai juga menjadi faktor penting dalam implementasi kurikulum ini di sekolah (Firman, 2020).

Kurikulum ini menitikberatkan pada pembelajaran tematik-integratif, menggabungkan keterampilan abad 21 seperti kolaborasi, komunikasi, kreativitas, dan pemikiran kritis. Evaluasi pada kurikulum ini menunjukkan bahwa meskipun didesain lebih komprehensif, implementasinya masih dirasa membebani siswa dengan jumlah materi yang banyak. Selain itu, aspek psikomotor dan afektif belum sepenuhnya terfasilitasi, sehingga penekanan masih dominan pada aspek kognitif (Ulya & Syafei, 2022).

4) Kurikulum Merdeka

Kurikulum merdeka belajar menurut Badan Standar Nasional Guruan (BSNP) adalah kurikulum pembelajaran yang berkaitan dengan pendekatan bakat dan minat. Kebebasan berpikir kreatif dan mandiri adalah fokus dari kurikulum ini dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam dimana konten akan lebih optimal dipelajari siswa karena mereka memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensinya. Guru pun memiliki kebebasan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat siswa (Pionera et al., 2023).

Kurikulum merdeka, memberi pemahaman terhadap alur tujuan pembelajaran seperti apa yang akan digunakan. Sesuai keputusan kepala badan standar, kurikulum, dan asesmen pendidikan kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi nomor 008/H/KR/2022 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini. Jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah pada kurikulum merdeka. Hasil keputusan pemerintah telah beredar lengkap dengan struktur-struktur yang akan dicapai. Melalui juknis tersebut, guru-guru beserta orang-orang berkepentingan dalam hal menyukseskan kurikulum ini sedang sosialisasi dan mempelajari hal-hal yang perlu diketahui untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka (Noor et al., 2023).

C. Tantangan dan antisipasi menghadapi Abad 12

Lembaga pendidikan Islam memainkan peran penting dalam menghadapi tantangan dan antisipasi abad ke-21, khususnya dalam merespons isu radikalisme dan intoleransi beragama yang berkembang di masyarakat. Lembaga pendidikan Islam berperan dalam menginternalisasikan nilai-nilai Islam moderat seperti tawassuth (jalan tengah), tawazun (keseimbangan), i'tidal (lurus dan tegas), tasamuh (toleransi), musawah (egaliter), dan syura (musyawarah). Nilai-nilai ini penting untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, toleran, dan berkeadilan. Lingkungan pendidikan yang moderat penting untuk membentuk karakter moderat pada peserta didik. Lembaga pendidikan Islam perlu mengedepankan pendidikan yang mendukung sikap moderasi beragama di kalangan tenaga pendidik dan siswa, sehingga dapat menangkal pengaruh paham radikal. Upaya ini juga meliputi pemilihan tenaga pendidik yang moderat dalam beragama untuk mencegah paparan ekstremisme di lingkungan Pendidikan (Heriyudanta, 2023).

Lembaga pendidikan Islam perlu memasukkan nilai-nilai Islam moderat dalam kurikulum, termasuk dalam tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi pembelajaran. Sebagai contoh, dalam kurikulum madrasah, nilai-nilai moderasi ini diintegrasikan ke dalam mata pelajaran seperti Al-Qur'an Hadits, Fikih, Akidah Akhlak, dan sejarah Islam. Dengan demikian, moderasi beragama tidak diajarkan sebagai mata pelajaran terpisah, tetapi terintegrasi dalam semua aspek pembelajaran.(Heriyudanta, 2023) Salah satu tantangan utama pendidikan Islam di Indonesia adalah adanya kesenjangan kualitas antara pendidikan Islam formal dan nonformal. Meskipun madrasah sebagai pendidikan Islam formal telah lama berdiri, masih banyak yang kekurangan sumber daya yang memadai, baik dari segi infrastruktur, tenaga pengajar berkualitas, maupun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan zaman (Husni et al., 2023).

Sementara itu, pendidikan Islam nonformal, seperti pesantren, sering menghadapi keterbatasan dalam hal akses dan kesinambungan pendanaan. Tantangan lainnya adalah kurangnya integrasi antara pendidikan Islam dengan sistem pendidikan nasional. Walaupun pendidikan Islam diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, ketidakseimbangan antara kurikulum pendidikan Islam dan kurikulum nasional sering terjadi. Hal ini menyebabkan siswa yang mengikuti pendidikan Islam cenderung terpisah dari siswa lainnya

dalam hal pengembangan keterampilan, pemahaman budaya, serta kemampuan berkomunikasi secara efektif (Husni et al., 2023).

Adapun tantangan utama yang dihadapi lembaga pendidikan Islam dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan meliputi sikap skeptis masyarakat, Banyak masyarakat memandang lembaga pendidikan Islam sebagai alternatif kedua setelah sekolah umum. Persepsi bahwa lembaga-lembaga ini lebih menekankan pendidikan agama daripada pendidikan umum membuat lembaga pendidikan Islam dianggap kurang relevan dengan perkembangan zaman (Rahman & Akbar, 2021). Kurikulum pendidikan Islam di Indonesia diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan era digitalisasi, revolusi industri, dan kebutuhan akan soft skills serta hard skills. Evaluasi kurikulum masa depan diharapkan mengarah pada rekonstruksi sosial yang membekali siswa dengan keterampilan untuk bersaing secara global (Ulya & Syafei, 2022).

Walaupun demikian, peluang pengembangan kurikulum Lembaga Pendidikan Islam yaitu: 1) Paradigma baru dalam pembelajaran: mengembangkan model pembelajaran yang sistemik, yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan aspek kehidupan lainnya. Model ini menekankan pentingnya menjadikan ajaran agama sebagai dasar dalam semua aktivitas kehidupan mahasiswa; 2) Integrasi inklusivitas Islam: Pendekatan inklusivitas dalam PAI dapat membantu mahasiswa menerima pluralitas dalam masyarakat dengan cara yang moderat, sehingga mengurangi risiko radikalisme dan ekstremisme. Hal ini juga membuka peluang untuk mengembangkan pemahaman agama yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan modern. Melalui peluang-peluang ini, pendidikan agama di Perguruan Tinggi dapat berkontribusi dalam menciptakan lulusan yang tidak hanya memiliki kemampuan intelektual tetapi juga memiliki karakter religius yang baik dan mampu bersaing di tengah tuntutan zaman (Muslimin & Ruswandi, 2022).

4. KESIMPULAN

Kurikulum pendidikan Islam di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti pemisahan ilmu agama dan umum, kurikulum sentralistik, metode pengajaran konvensional, dan keterbatasan profesionalitas tenaga pendidik. Tantangan ini menghambat perkembangan pendidikan Islam dalam menghadapi kebutuhan zaman modern dan persaingan global. Kurikulum pendidikan Islam telah mengalami transformasi sejak masa orde lama, orde baru, hingga era reformasi, dengan tujuan untuk menyesuaikan pendidikan Islam terhadap konteks sosial-politik dan kebutuhan pendidikan nasional. Setiap periode membawa kebijakan dan fokus yang berbeda, mulai dari nasionalisme dan patriotisme di masa orde lama hingga integrasi nilai agama dan kompetensi modern pada masa reformasi. Pendidikan Islam perlu mengedepankan kurikulum yang integratif, menggabungkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk menciptakan generasi berkarakter dan kompetitif. Selain itu, pengembangan pendidikan Islam di abad 21 harus mampu mengatasi tantangan global, seperti radikalisme, kebutuhan soft skills, dan integrasi teknologi.

5. DAFTAR PUSTAKA

Addakhil, M. I. J. (2019). Problematika Pengembangan Kurikulum di Lembaga Pendidikan Islam: Tinjauan Epistimologi. 9(1), 1–11.

Adelia, I., & Mitra, O. (2021). Permasalahan Pendidikan Islam di Lembaga Pendidikan Madrasah. Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 21(1), 32–45. https://doi.org/10.32939/islamika.v21i01.832

Anitasari, L., & Cahyono, A. (2023). Kurikulum dan Pola Ilmu Pengetahuan Pada Masa Orde Lama dan Orde Baru. Social Science Academic, 1(2), 93–98. https://doi.org/10.37680/ssa.v1i2.3390

Bakar, M. Y. A. (2015). Problematika Pendidikan Islam di Indonesia. DIRASAT: Jurnal Manajemen & Pendidikan Islam, 1(99–123).

Damopolii, M. (2015). Problematika Pendidikan Islam dan Upaya-upaya Pemecahannya. Tadbir, 3(1), 68–81.

Firman, C. (2020). Implementasi Manajemen Kurikulum 2013 Di Madrasah Aliyah Integratif Nu Al-Hikmah. Leadership:Jurnal Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam, 1(2), 238–251. https://doi.org/10.32478/leadership.v1i2.449

Gusman, B. A. (2022). Studi Kebijakan Pendidikan Agama Islam Pada Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi. SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam, 5(2), 187–205. https://doi.org/10.54396/saliha.v5i2.348

Heriyudanta, M. (2023). Internalisasi Nilai-Nilai Islam Moderat dalam Proses Pendidikan Islam di Indonesia. MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam, 4(2), 203–215. https://doi.org/10.21154/maalim.v4i2.7250

Husni, N., Arsy, R. A., Fitria, H., & Gusmaneli. (2023). Problematika Pendidikan Islam di Indonesia. 2(2), 137–145.

Julaeha, S. (2019). Problematika Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Karakter. Penelitian Pendidikan Islam, 7(2), 157–182.

Muslimin, E., & Ruswandi, U. (2022). Tantangan, Problematika dan Peluang Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi. Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies, 2(1), 57–71.

Nirwana, R., & Khoiri, Q. (2023). Kebijakan Kurikulum Pendidikan Islam Pada Satuan Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi. Journal on Education, 5(2), 5266–5278.

Noor, I. H., Izzati, A., & Azani, M. Z. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. Iseedu: Journal of Islamic Educational Thoughts and Practices, 7(1), 30–47.

Pionera, M., Syarif, A., & Agustina, S. R. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Pada Mata Pelajaran Pai Kelas Vii Smpn Satu Atap-2 Tewang Sangalang Garing. Hadratul Madaniah, 10(2), 20–25.

Rahman, D., & Akbar, A. R. (2021). Problematika yang Dihadapi Lembaga Pendidikan Islam sebagai Tantangan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. Nazzama: Journal of Management Education, 1(1), 76–89. https://doi.org/10.24252/jme.v1i1.25242

Rohman, M. (2015). Problematika Kurikulum Pendidikan Islam. Madaniyah, 8, 1–15.

Rozi, B. (2019). Problematik Pendidikan Islam Di Era Revolusi Industri 4.0. Jurnal Pendidikan Islam, 9(1), 33–47.

Sabtina, D. (2023). Problematika Pendidikan Islam di Era Globalisasi dan Alternatif Solusinya. Dirosat: Journal of Education, Social Science & Humanities, 1(2), 58–68.

Sudarmono, Muh. A. (2020). Tinjauan Sejarah Pendidikan Islam Masa Orde Lama. Jurnal Studi Pemikiran Pendidikan Agama Islam, 18(1), 17–26.

Suryana, Y., & Pratama, F. Y. (2018). Manajemen Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah. Jurnal Isema : Islamic Education Manajemen, 3(1), 89–98. https://doi.org/10.15575/isema.v3i1.3287

Ulya, N., & Syafei, M. M. (2022). Evaluasi Kebijakan Kurikulum Pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan Tambusai, 6(2), 9412–9420.

E.ISSN. 3032-2472
Vol. 2 No. 1 Edisi
Januari 2025

Zazkia, S. A., & Hamami, T. (2021). Evaluasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Tengah Dinamika Politik Pendidikan di Indonesia. At-Ta'Dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam, 13(1), 82–93.